

KEKUATAN EKSEKUTORIAL
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN PTUN TANJUNG PINANG NO. 6/G/2015/PTUN.TPI)

Oleh:

Rizky Yunanto
E1A014042

ABSTRAK

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/2015/PTUN.TPI, yang akan menguraikan mengenai kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Rektor Universitas Putera Batam yang merupakan universitas swasta dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang Penjatuhan *Drop Out* (DO) terhadap Penggugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Tergugat bertentangan dengan aspek prosedural/formal. Oleh karena itu, Majelis Hakim di dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa serta Tergugat dibebani kewajiban untuk menerbitkan KTUN baru untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula. Oleh karena Tergugat bukanlah Pegawai Negeri, maka untuk memaksa Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan *a quo* tidaklah mudah.

Kata kunci: Kekuatan eksekutorial, Putusan Pengadilan, Penegakan hukum

**EXECUTORIAL POWER OF
STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISION
IN THE LAW ENFORCEMENT PROCESS
(RESEARCH OF DECISION OF TANJUNG PINANG STATE
ADMINISTRATIVE COURT NO. 6/G/2015/PTUN/TPI)**

By:

**Rizky Yunanto
EIA014042**

ABSTRACT

This research is based on the Decision of the State Administrative Court of Tanjung Pinang No. 6/G/2015/PTUN.TPI, which will describe the executorial power of the Decision of the State Administrative Court.

The Defendant in a quo dispute is Rector of Putera Batam University which is a private university and the object of the lawsuit is the Decision of Rector of Putera Batam University No. 017/UPB/II/2015 on February 11 2015 about Drop Out to Plaintiff. The method used in this research is normative juridical with legislation approach, case approach, and conceptual approach.

The Panel of Judges in its legal consideration mentioned that in publishing the decision of the dispute object, the Defendant was incompatible with procedural/formal aspect. Therefore, the Panel of Judges in its ruling granted the Plaintiff's claim and declared the invalidation of the dispute object and ordered the Defendant to publishing a new KTUN to restore the original Plaintiff's status. Because of the Defendant was not a state employee, so it was difficult to execute the Decision of the State Administrative Court.

Keywords: Executorial power, State Administrative Court Decision, Law enforcement